

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Arief Noviarakhman Zagladi¹, Ernawati², Sutrisno³

^{1,2} Universitas Negeri Malang, Indonesia

^{2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, Indonesia

Received : 1 Juni 2026, Revised : 10 Juni 2026, Published : 19 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Arief Noviarakhman Zagladi

E-mail: a_zagladi@yahoo.com

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Pariwisata berkelanjutan hadir sebagai pendekatan alternatif yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan pada pentingnya pelibatan masyarakat lokal, konservasi sumber daya alam dan budaya, serta pembangunan ekonomi jangka panjang yang inklusif. Kegiatan ini diawali dengan survei dan wawancara di 10 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi tindakan untuk mempersiapkan semua obyek wisata tersebut menuju standar pariwisata berkelanjutan seperti diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa semua obyek yang dikunjungi masih belum memenuhi standar pariwisata berkelanjutan, sehingga perlu dipersiapkan berbagai tindakan seperti mulai menerapkan tiket masuk, menambah tenaga kerja, melakukan survei kontribusi ekonomi, melakukan survei kepuasan wisatawan dan tenaga kerja, memberikan dukungan dan pelatihan terhadap UMKM lokal, berkomunikasi aktif dengan masyarakat lokal, serta menyediakan aksesibilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus.

Kata kunci - pariwisata, pertumbuhan ekonomi, standar pariwisata berkelanjutan, Kabupaten Barito Selatan

Abstract

Tourism is a strategic sector in the Indonesian economy, contributing significantly to various sectors, particularly the economic sector. Sustainable tourism presents itself as an alternative approach that prioritizes the principles of sustainable development, namely maintaining a balance between economic growth, environmental sustainability, and social welfare. This concept emphasizes the importance of local community involvement, conservation of natural and cultural resources, and inclusive long-term economic development. This activity began with a survey and interviews at 10 tourist destinations in South Barito Regency, Central Kalimantan, followed by a socialization of actions to prepare all tourist attractions to meet sustainable tourism standards as stipulated in Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations. The results of the activity indicated that all visited attractions still did not meet sustainable tourism standards, necessitating various preparedness measures, such as implementing entrance fees, increasing the workforce, conducting economic contribution surveys, conducting tourist and worker satisfaction surveys,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

providing support and training to local MSMEs, actively communicating with local communities, and providing accessibility for tourists with special needs.

Keywords - *tourism, economic growth, sustainable tourism standards, South Barito Regency Central Kalimantan*

How To Cite : Zagladi, A. N., Ernawati, E., & Sutrisno, S. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(12), 584 - 593. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i12.310>

Copyright ©2026 Arief Noviarakhman Zagladi, Ernawati Ernawati, Sutrisno Sutrisno

PENDAHULUAN

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan adalah salah satu program pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dalam peraturan Menteri ini, pemerintah meyakini bahwa dibutuhkan standar pengelolaan kepariwisataan yang baik agar keberadaan destinasi-destinasi wisata di Indonesia dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Di dalam peraturan Menteri tersebut, dituliskan bahwa pedoman destinasi pariwisata Berkelanjutan ini merupakan revisi dari Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2016 yang telah sesuai dengan standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan telah mendapat pengakuan dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO), dalam menjawab tantangan pengembangan di sektor pariwisata saat ini, khususnya penekanan isu kearifan lokal di Indonesia serta isu Kebersihan (Cleanliness), Kesehatan (Health), Keamanan (Safety) dan Keberlanjutan Lingkungan (Environment Sustainability) yang menjadi tindakan antisipatif bagi penyebaran virus COVID-19. Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya di destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa pengertian dari Wisata menurut para ahli. Menurut Hunziker dan Krapf (1942) dalam Andreis & Carioni (2019), Wisata atau tourism adalah seluruh kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kesenangan dan bukan untuk tujuan mencari nafkah atau tinggal menetap. Pengertian lain dari Spillane (1994), pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan sementara dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan rekreasi, memenuhi keinginan pribadi, atau menjalankan tugas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau belajar hal-hal unik di tempat yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Inskeep (1991) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan promosi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman positif kepada wisatawan serta manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Menurut Gunn & Var (2020), pengembangan pariwisata merupakan serangkaian upaya yang sistematis dalam memanfaatkan potensi lokal yang meliputi sumber daya alam, budaya, dan manusia untuk menciptakan destinasi yang menarik dan berkelanjutan.

Cooper et al. (2008) mengklasifikasikan pengembangan wisata ke dalam beberapa jenis, antara lain wisata alam, wisata budaya, ekowisata dan wisata berkelanjutan. Menurut The United Nations World Tourism Organization (UNWTO), pengembangan wisata harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan tiga pilar utama yaitu aspek ekonomi untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, aspek sosial-budaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan aspek lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan meminimalisasi dampak negatif

dari aktivitas wisata.

Tosun (2000) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, terutama di negara berkembang. Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam tahap implementasi, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan evaluasi akan meningkatkan rasa memiliki dan mencegah konflik sosial. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai pelaku usaha wisata, penyedia jasa akomodasi, pemandu wisata, atau pelestari budaya lokal. Partisipasi yang aktif dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan memperkuat keberlanjutan destinasi wisata.

Dalam konteks pengembangan wisata, terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Butler-Henderson & Crawford (2020) dalam model Tourism Area Life Cycle (TALC) menjelaskan bahwa tanpa perencanaan yang matang, suatu destinasi wisata akan mengalami kejenuhan, penurunan minat wisatawan, hingga penurunan kualitas destinasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada potensi lokal agar pengembangan wisata dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan juga.

Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah juga memiliki beberapa obyek wisata yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Beberapa obyek wisata yang cukup terkenal seperti danau Sadar, danau Sanggu, Rumah Betang Nansarunai, Pemandian Banyu Habang, Taman Iring Witu, dan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Barito Selatan untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Suatu destinasi wisata dapat dikatakan sudah mewujudkan pariwisata berkelanjutan jika sudah memenuhi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (Dewi et al., 2023). Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan pengelolaan, potensi serta peran masyarakat dapat menjadi modal untuk keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan secara jangka Panjang (Yatmaja, 2019). Akan ada banyak keuntungan dari keberadaan pariwisata berkelanjutan bagi masyarakat, terutama untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat setempat (H. Hermawan, 2016; Ristanti & Sulisty, 2025; Satrio & Sabana, 2018; Sulisty & Arisanti, 2025).

Kegiatan ini memfokuskan pada satu kriteria dulu untuk menjadi perhatian utama, yaitu kriteria keberlanjutan sosial dan ekonomi, dimana kriteria ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh destinasi wisata tersebut.

METODE

Kegiatan dilaksanakan melalui kunjungan ke 10 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Pemilihan 10 destinasi wisata ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPARKAP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 – 2035, dan kemudian dipilah lagi menjadi tersisa 10 obyek wisata atas arahan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Pariwisata Kab. Barito Selatan. Destinasi wisata yang dimaksud meliputi Taman Iring Witu, Danau Sadar, Pemandian Cendana Harum, Rumah Betang Nansarunai, Danau Sanggu, Pemandian Wenu Janang, Danau Menanjung, Kerbau Rawa Kelanis, Danau Situ Ulin Gagumet Wayun, dan Desa Wisata Budaya Kalahien.

Kegiatan diawali dengan observasi langsung ke masing-masing destinasi wisata untuk melihat langsung ketersediaan dari berbagai dokumen dan fasilitas yang menjadi standar sosial dan ekonomi dari destinasi wisata berkelanjutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, seperti pengelola destinasi wisata, para pekerjanya, dan beberapa pengunjung. Indikator yang digunakan saat observasi, wawancara, dan penilaian berdasarkan pada lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi

Pariwisata Berkelanjutan, khususnya bagian keberlanjutan sosial dan ekonomi. Indikator-indikator tersebut dijabarkan pada tabel 1

Tabel 1.

Indikator Penilaian Kesiapan Destinasi Wisata Untuk Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi		
No	Kriteria	Indikator
1	Memberikan manfaat ekonomi lokal: Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata, peluang kerja dan karier, dan menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survei data ekonomi 2. Memiliki laporan tahunan tentang kontribusi ekonomi dari destinasi wisata 3. Memiliki data hasil pengukuran dampak ekonomi dari destinasi wisata 4. Menyelenggarakan program pelatihan yang relevan 5. Memiliki kesepakatan tentang peluang kerja bagi Masyarakat setempat 6. Menyelenggarakan pelatihan yang bebas diskriminasi 7. Memiliki mekanisme pengelolaan keluhan seputar tenaga kerja 8. Mendukung keberadaan UMKM 9. Membantu UMKM dalam akses pasar terkait pariwisata setempat 10. Memiliki kesepakatan untuk mengutamakan produk lokal 11. Aktif membantu pengusaha setempat dalam rantai nilai pariwisata 12. Membuat daftar produk untuk disampaikan ke pengunjung
2	Kesejahteraan dan Dampak Sosial: Dukungan bagi masyarakat, Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi, hak kepemilikan dan pengguna, keselamatan dan keamanan, dan akses untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki mekanisme untuk memfasilitasi Prakarsa keberlanjutan antara pengelola dengan Masyarakat 2. Memiliki mekanisme untuk memfasilitasi Prakarsa keberlanjutan antara pengunjung dengan Masyarakat 3. Melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan 4. Menetapkan undang-undang yang akan digunakan terkait eksploitasi dan diskriminasi 5. Melakukan sosialisasi undang-undang yang akan digunakan terkait eksploitasi dan diskriminasi 6. Memiliki mekanisme pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi terjadinya eksploitasi dan diskriminasi 7. Memiliki kesepakatan dengan pemangku kepentingan terkait aturan tentang eksploitasi dan diskriminasi 8. Menetapkan undang-undang yang akan digunakan terkait hak kepemilikan dan pengguna 9. Menerapkan undang-undang yang akan digunakan terkait hak kepemilikan dan pengguna 10. Memiliki bukti telah menerapkan undang-undang yang akan digunakan terkait hak kepemilikan dan pengguna 11. Memiliki bukti adanya kegiatan konsultasi kepada Masyarakat terkait tentang hak kepemilikan dan pengguna 12. Tersedia layanan keselamatan dan keamanan yang beroperasi secara aktif 13. Memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan pengunjung terkait layanan keselamatan dan keamanan 14. Melakukan inspeksi berkala terhadap fasilitas di tempat pariwisata 15. Memiliki aturan dan standar aksesibilitas pengunjung 16. Mengimplementasikan standar aksesibilitas pengunjung 17. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi daya dukung fasilitas di tempat wisata terhadap aksesibilitas pengunjung 18. Memiliki program untuk meningkatkan akses untuk orang-orang berkebutuhan khusus 19. Mensosialisasikan aksesibilitas berbagai fasilitas yang ada di tempat wisata 20. Terdapat rincian aksesibilitas fasilitas yang bisa dilihat pengunjung

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi rekomendasi kepada masing-masing pengelola destinasi wisata dan dinas terkait untuk meningkatkan kesiapan destinasi-destinasi wisata di

Kabupaten Barito Selatan menuju Destinasi Wisata Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan selama 5 bulan, sejak bulan Agustus hingga Desember 2025. Kegiatan diawali dengan kunjungan ke masing-masing destinasi wisata, wawancara awal, observasi lapangan, dan wawancara lapangan. Setelah semua data terkumpul, seluruh pengelola destinasi wisata dan dinas terkait dikumpulkan untuk pelaksanaan sosialisasi rekomendasi hasil kegiatan. Jadwal kegiatan yang lebih terperinci ada pada Tabel 2.

Tabel 2.
Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Rentang Waktu
1	Persiapan	Agustus 2025
2	Wawancara Awal	Agustus 2025
3	Observasi Lapangan	September 2025
4	Wawancara Lapangan	September 2025
5	Analisis Hasil Observasi dan Wawancara	Oktober – November 2025
6	Sosialisasi Rekomendasi Hasil Kegiatan	Desember 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pariwisata berkelanjutan mampu mendorong peningkatan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (Tioputri et al., 2025). Berdasarkan pada hasil observasi di lapangan dilengkapi dengan wawancara dengan berbagai informan, dapat diketahui bahwa semua destinasi wisata yang diteliti di Kabupaten Barito Selatan belum memenuhi standar keberlanjutan sosial dan ekonomi untuk destinasi wisata berkelanjutan seperti diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Dari 10 tempat wisata yang dikunjungi, hanya 5 Destinasi wisata yang meminta retribusi tiket masuk, yaitu pemandian cendana harum, Rumah Betang Nansarunai, Danau Sanggu, pemandian Wenu Janang, dan Situ Ulin Gagumet. Retribusi tiket masuk tidak hanya berperan untuk memberikan pemasukan bagi pengelola tempat wisata, tetapi juga berfungsi untuk pendataan jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Melalui retribusi karcis masuk, pengelola tempat wisata memiliki anggaran untuk melakukan perawatan dan pengembangan fasilitas di tempat wisata tanpa harus mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun pihak lain. Pengelola tempat wisata juga sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari retribusi parkir, sewa tempat oleh para pedagang, maupun penjualan cinderamata, tetapi faktanya hanya sedikit tempat wisata yang betul-betul mengelola hal tersebut.

Dari sisi kesiapan dalam pemenuhan standar keberlanjutan sosial, sebagian besar tempat wisata masih belum memperhatikan hal-hal penting seperti menyediakan fasilitas kesehatan dan sarana prasarana untuk wisatawan penyandang disabilitas. Hal ini dirasakan wajar, mengingat wisatawan yang datang cenderung sedikit dan pengelola tempat wisata belum memiliki pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemenuhan standar pariwisata berkelanjutan penting dimiliki oleh setiap destinasi wisata, agar tercipta destinasi wisata yang memuaskan bagi para wisatawan, berdampak positif bagi masyarakat sekitar, mengembangkan budaya lokal, serta mampu untuk terus tumbuh secara dan berkembang berkelanjutan. Fasilitas wisata yang lengkap dan menyenangkan akan menarik lebih banyak wisatawan untuk datang. Bertambahnya jumlah wisatawan akan menarik perhatian dari para pedagang, sehingga menambah jumlah pedagang yang ada di sekitar tempat wisata, seperti pedagang makanan, minuman, dan oleh-oleh. Keberadaan para pedagang ini selain memberikan penghasilan tambahan bagi pengelola tempat wisata (sehingga pengelola tempat wisata bisa membangun lebih

banyak fasilitas bagi wisatawan), juga akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, sehingga tercipta multiplier effect yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak sekali perbaikan dari berbagai aspek agar tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Selatan mampu memenuhi standar sosial dan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan.

Upaya meningkatkan kesiapan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Barito Selatan membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, terutama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan. Perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh atas semua indikator yang ada pada aspek sosial dan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan, sesuai dengan apa yang tertera di Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan meliputi:

1. Menerapkan tiket masuk untuk semua wisatawan

Obyek wisata di Kabupaten Barito Selatan harus memiliki sistem yang memastikan pendapatan dan manfaat non-finansial (seperti peningkatan infrastruktur atau layanan publik) dari pariwisata diterima oleh masyarakat lokal. Prioritas diberikan kepada masyarakat lokal untuk pekerjaan, pelatihan, dan peluang bisnis yang ditimbulkan oleh pariwisata. Setiap obyek wisata wajib menerapkan tiket masuk sehingga setiap wisatawan yang datang setiap harinya selalu terdata. Untuk itu, perlu dibangun pintu masuk dan pintu keluar yang ada penjaganya, sehingga tidak ada pengunjung yang masuk tanpa tiket. Harga tiket bisa disesuaikan dengan banyak aspek, seperti kebutuhan tempat wisata, atau menyesuaikan dengan daya beli masyarakat.

2. Mempekerjakan petugas dalam jumlah yang cukup

Agar suatu tempat wisata bisa dikelola dengan baik, dibutuhkan para petugas yang aktif bekerja di tempat wisata tersebut, terutama di jam buka. Jumlah pekerja yang dipekerjakan bisa bervariasi, tergantung pada job description dan job specification yang sudah disiapkan. Jika tempat wisata masih belum terlalu ramai dengan wisatawan, satu orang pekerja bisa mengerjakan tugas rangkap (seperti penjaga kasir merangkap petugas kebersihan dan pengelola wahana). Saat tempat wisata sudah mulai ramai dengan pengunjung, sebaiknya tersedia petugas dengan job description yang tetap.

Untuk meningkatkan dampak ekonomi dari tempat wisata terhadap penduduk lokal, maka sebaiknya penduduk lokal diprioritaskan untuk bekerja di destinasi wisata tersebut. Selain itu, penduduk lokal biasanya lebih memahami berbagai kondisi dan situasi yang mungkin terjadi di tempat wisata sehingga mereka lebih sigap terhadap berbagai insiden. Tempat tinggal mereka yang dekat dengan tempat wisata juga meringankan biaya transportasi bagi para pekerja.

Agar para pekerja lokal ini bisa menjadi pekerja yang berkualitas, dibutuhkan berbagai pelatihan, seperti:

- a. Pelayanan Prima (Service Excellence), seperti teknik menyambut dan melayani tamu dengan ramah (keramahan lokal), menciptakan kesan pertama yang positif, komunikasi efektif (termasuk kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bahasa Inggris), serta penanganan keluhan tamu secara cepat, empatik, dan tepat.
- b. Pengetahuan Produk (Product Knowledge), seperti pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan alam di sekitar obyek wisata, serta kemampuan menceritakan kisah (storytelling) yang menarik dan otentik.
- c. Pemahaman dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu pelatihan khusus untuk setiap peran di tempat wisata (misalnya, SOP housekeeping, food preparation, atau keselamatan dan keamanan).
- d. Keterampilan Digital Dasar, yaitu mampu menggunakan perangkat sederhana (misalnya, mesin kasir digital, sistem pemesanan online, atau media sosial untuk promosi).

3. Melakukan survei kontribusi ekonomi secara berkala

Survei kontribusi ekonomi dapat dilakukan pada banyak aspek. Tujuan dari survei

kontribusi ekonomi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana obyek wisata memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya. Aspek-aspek yang dapat di data pada setiap periode pendataan meliputi:

- a. Pemasukan tempat wisata. Data ini meliputi pemasukan dari tiket masuk, tiket wahana yang tersedia, sewa tempat para pedagang, bisnis yang dikelola sendiri oleh pengelola obyek wisata (misalnya toko souvenir) dan pemasukan-pemasukan lain.
 - b. Turnover karyawan (jumlah karyawan saat ini, jumlah karyawan yang berhenti, dan jumlah karyawan baru yang masuk). Data ini dilengkapi juga dengan persentase jumlah karyawan yang berasal dari penduduk lokal, lengkap dengan struktur upah yang diberikan
 - c. pembelian barang dan jasa untuk kebutuhan tempat wisata. Pendataan dilakukan terhadap semua biaya yang keluar untuk berbagai fasilitas yang tersedia di tempat wisata. Perlu juga disediakan data persentase jumlah pembelian yang dilakukan kepada masyarakat setempat (seperti mempekerjakan tukang dari masyarakat setempat atau membeli keperluan tempat wisata dari masyarakat sekitar).
 - d. Jumlah UMKM yang ada di tempat wisata. Data ini dilengkapi dengan pemasukan yang diterima oleh obyek wisata, pemasukan dari para UMKM itu sendiri, serta persentase jumlah UMKM yang berasal dari masyarakat lokal dan dari luar.
 - e. Daftar fasilitas dan wahana yang tersedia di tempat wisata. Data ini juga melakukan pemilahan terhadap fasilitas yang masih layak pakai dan yang sudah tidak layak serta wahana yang masih aktif dan yang tidak.
4. Melakukan survei kepuasan wisatawan dan karyawan secara berkala

Penting bagi pengelola obyek wisata untuk selalu melakukan survei kepuasan wisatawan secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya untuk kepentingan perbaikan ke depan. Melalui hasil survei kepuasan wisatawan, pengelola tempat wisata bisa mendapatkan banyak informasi tentang apa saja yang sudah memuaskan di tempat wisata tersebut dan apa saja yang perlu segera diperbaiki. Survei bisa dilakukan secara manual, seperti membagikan lembar kuesioner singkat untuk diisi wisatawan saat mereka berada di pintu keluar, atau menggunakan teknologi informasi, seperti sosial media, Google Business review, dan lain-lain. Pengelola tempat wisata bisa menempelkan QR Code di area pintu keluar yang mengarahkan wisatawan kepada halaman survei. Hasil dari survei ini harus didokumentasikan secara berkala dan menjadi bahan untuk melakukan berbagai perbaikan di tempat wisata.

Selain kepuasan wisatawan, perusahaan juga perlu secara berkala melakukan survei kepuasan karyawan dan mendokumentasikan hasilnya. Karyawan yang tidak puas cenderung akan menurunkan perannya di dalam organisasi dan bisa berujung pada voluntary turnover. Banyak penelitian yang juga mengaitkan kepuasan karyawan dengan kepuasan wisatawan, yang mana karyawan yang puas dengan pekerjaannya diyakini akan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi tempat kerjanya, termasuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wisatawan. Aspek yang diukur pada kepuasan karyawan meliputi kepuasannya terhadap penghasilan yang diterima, fasilitas yang didapat, lingkungan kerja (fisik dan non fisik), karier, serta supervisi dari pimpinan.

5. Mendukung dan memberikan pelatihan kepada UMKM Lokal

Bentuk dukungan dari tempat wisata terhadap perkembangan UMKM, terutama UMKM lokal bisa diwujudkan dalam banyak hal. Untuk itu, diperlukan strategi kemitraan yang terstruktur, saling menguntungkan, dan berkelanjutan dari kedua belah pihak. Langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan integrasi pasar.

Tempat wisata adalah tempat yang sangat potensial untuk berdagang karena kebanyakan wisatawan datang tidak hanya ingin menikmati fasilitas yang disediakan oleh tempat wisata tetapi juga berbelanja. Pengelola tempat wisata harus bisa memanfaatkan daya tarik ini untuk mengarahkan pembeli ke UMKM lokal melalui berbagai strategi, seperti:

- a. Menyediakan stand gratis atau berbiaya murah kepada UMKM lokal
 - b. Memprioritaskan produk merchandise dari masyarakat lokal dibandingkan yang berasal dari luar
 - c. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di tempat wisata dari masyarakat lokal
 - d. Menerapkan strategi bundling, seperti memaketkan tiket masuk dengan kegiatan yang melibatkan UMKM lokal, seperti kelas membuat kerajinan, berkeliling menaiki hewan lokal (misalnya kerbau rawa), kursus singkat tarian tradisional, berfoto dengan pakaian adat setempat, dan lainnya.
 - e. Menyediakan data tentang UMKM yang tersedia, lengkap dengan produk dan jasa yang ditawarkan di website resmi tempat wisata.
6. Melakukan komunikasi dan kerjasama aktif dengan masyarakat setempat

Pembangunan dan keberlanjutan destinasi wisata sangat bergantung pada komunikasi yang transparan dan kerjasama yang tulus dengan masyarakat setempat. Masyarakat lokal perlu terlibat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat kearifan lokal (Meitolo Hulu, 2024) Pada dasarnya, pengelola harus melihat masyarakat bukan hanya sebagai objek yang diberi manfaat ekonomi, melainkan sebagai mitra utama dan pemilik sah dari warisan budaya dan alam di kawasan tersebut. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah membangun saluran komunikasi dua arah yang formal dan informal. Ini dapat dimulai dengan membentuk forum komunikasi reguler—mungkin sebulan sekali—yang melibatkan tokoh adat, kepala lingkungan, perwakilan pemuda, dan kelompok wanita. Di forum ini, pengelola harus bertindak sebagai pendengar aktif, menyajikan rencana pengembangan dengan terbuka, dan yang terpenting, meminta masukan kritis sebelum keputusan penting diambil, memastikan masyarakat merasa dilibatkan dalam proses perencanaan sejak awal.

Selanjutnya, pengelola perlu memastikan bahwa informasi penting, baik yang bersifat keberhasilan maupun masalah, diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui papan pengumuman komunitas, media sosial lokal, atau bahkan pengumuman melalui tempat ibadah. Prinsip kuncinya adalah transparansi pendapatan dan manfaat. Ketika masyarakat mengetahui dengan jelas berapa persentase keuntungan tiket masuk yang dialokasikan untuk program desa (seperti perbaikan jalan atau beasiswa), kepercayaan akan terbangun. Kerjasama aktif ini kemudian diperkuat melalui program pemberdayaan yang otentik, di mana pengelola tidak hanya memberi pekerjaan, tetapi juga melatih masyarakat untuk mengisi posisi manajerial dan kepemimpinan, sehingga masyarakat lokal menjadi agen perubahan dan tidak lagi sekadar pekerja.

Puncak dari komunikasi dan kerjasama ini adalah lahirnya rasa kepemilikan kolektif terhadap destinasi wisata. Masyarakat yang merasa dihargai dan diuntungkan secara adil akan secara otomatis menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian budaya, keamanan, dan kebersihan obyek wisata. Misalnya, jika terjadi vandalisme atau perilaku pengunjung yang merugikan lingkungan, masyarakat akan lebih proaktif untuk menegur dan melaporkan. Dengan begitu, keberlanjutan tempat wisata tidak lagi menjadi tanggung jawab tunggal pengelola, melainkan menjadi budaya bersama yang mengakar kuat. Komunikasi yang aktif dan kerjasama yang adil ini menjamin bahwa pariwisata bertumbuh selaras dengan aspirasi lokal, menciptakan destinasi yang tangguh terhadap perubahan, dan bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang.

7. Menyediakan fasilitas kesehatan untuk wisatawan dan karyawan, serta aksesibilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus

Fasilitas kesehatan bisa disediakan dengan mendirikan klinik kecil di tempat wisata untuk membantu menangani masalah medis yang mungkin dialami oleh wisatawan maupun para karyawan di tempat wisata. Jika ini dirasa tidak memungkinkan, minimal tempat wisata menyediakan pelayanan ambulance untuk mengantar wisatawan atau karyawan yang sakit ke

rumah sakit terdekat.

Agar tempat wisata dapat menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi wisatawan berkebutuhan khusus (disabilitas), pengelola harus menerapkan pendekatan menyeluruh yang mencakup infrastruktur fisik, pelayanan, dan informasi, yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang setara dan mandiri bagi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Dari sisi infrastruktur fisik, fasilitas yang perlu disediakan meliputi:

- a. Akses kursi roda di sepanjang tempat wisata, termasuk tangga.
- b. Toilet khusus penyandang disabilitas
- c. Area parkir khusus penyandang disabilitas
- d. Papan informasi dengan huruf timbul di titik-titik penting

Selain infrastruktur fisik, tempat wisata juga harus memberikan pelatihan kepada para karyawan tentang bagaimana memberikan pelayanan terhadap wisatawan berkebutuhan khusus serta menyediakan informasi yang lengkap tentang fasilitas apa saja yang tersedia untuk wisatawan berkebutuhan khusus di tempat wisata tersebut.



Gambar 1.
Dokumentasi Lapangan

KESIMPULAN

Kegiatan ini secara jelas menegaskan bahwa pemenuhan aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, merupakan faktor kunci dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang tangguh di Kabupaten Barito Selatan. Analisis menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata, seperti yang terlihat di 10 destinasi wisata yang dijadikan fokus penelitian, masih sangat jauh dari pemenuhan standar keberlanjutan. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah untuk secara bertahap membangun masing-masing tempat wisata agar memenuhi standar keberlanjutan yang otomatis akan menarik lebih banyak lagi wisatawan di masing-masing destinasi wisata tersebut.

Berdasarkan pada serangkaian analisis yang sudah dilakukan, maka dapat dibuat ringkasan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing tempat wisata yang ada di Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut:

1. Menerapkan tiket masuk agar jumlah wisatawan yang datang bisa terdata

2. Mempekerjakan karyawan yang cukup dan profesional
3. Melakukan survei kontribusi ekonomi survei kepuasan masyarakat dan karyawan, serta saluran untuk menyampaikan keluhan, kemudian menggunakan hasilnya untuk bahan evaluasi.
4. Memberikan dukungan kepada UMKM lokal, baik itu dalam hal strategi bisnis dan fasilitas, maupun berbagai pelatihan.
5. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar
6. Membentuk satgas anti pelanggaran hak asasi manusia yang profesional
7. Menyediakan fasilitas kesehatan untuk wisatawan dan karyawan, serta berbagai fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus

DAFTAR PUSTAKA

- Andreis, F. De, & Carioni, M. (2019). A Critical Approach to the Tourism Management. *Open Journal of Applied Sciences*, 09(05), 335–341. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2019.95027>
- Butler-Henderson, K., & Crawford, J. (2020). Digitally empowered students through teacher leadership: The role of authentic leadership. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(Special Issue). <https://doi.org/10.37074/jalt.2020.3.s1.6>
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Wanhill, S., & Gilbert, D. (2008). *Tourism Principles and Practice* (4th ed.). Pearson Education, Limited.
- Dewi, R. N. M. S. P., Natalia, D., & Lorenza, F. A. (2023). Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penguatan Destinasi Wisata Pasca Pandemi di Desa Ekowisata Pancoh Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 28(2), 152. <https://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1695>
- Gunn, C. A. ., & Var, T. (2020). *Tourism planning basics, concepts, cases*. Routledge.
- H. Hermawan. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, Vol. III(No.2), 105–117.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning : an integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- Meitolo Hulu. (2024). Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus:Desa Wisata “Blue Lagoon” Di Kabupaten Sleman, DIY. *Journal of Tourism and Economic*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.36594/jtec/n964q634>
- Ristanti, R., & Sulisty, A. (2025). Konsistensi Strategi Pemasaran Dalam Mendukung Penciptaan Bisnis Umkm Berkelanjutan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 1065–1076. <https://doi.org/10.53625/juremi.v4i4.9600>
- Satrio, D., & Sabana, C. (2018). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 32(1), 31. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v32i1.935>
- Spillane, J. J. . (1994). *Pariwisata Indonesia : siasat ekonomi dan rekayasa kebudayaan*. Penerbit Kanisius : Lembaga Studi Realino.
- Sulistyo, A., & Arisanti, Y. (2025). Analisa Strategis Pada Industri Pendukung Pariwisata Dalam Menciptakan Bisnis Berkelanjutan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 1019–1028. <https://doi.org/10.53625/juremi.v4i4.9561>
- Tioputri, F. C., Sulisty, A., & Hayatri, M. A. S. (2025). Pariwisata Berkelanjutan Untuk Peningkatan Daya Saing Kampung Batik Giriloyo. *Warta Pariwisata*, 23(1), 35–46. <https://doi.org/10.5614/wpar.2025.23.1.06>
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Yatmaja, P. T. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1), 27–36. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.93>